

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman banyaknya jumlah kendaraan bermotor khususnya yang berada di Indonesia untuk itu perlu adanya sarana prasarana jalan yang baik agar terciptanya kenyamanan pengguna jalan. Keberadaan jalan raya yang menghubungkan antar berbagai wilayah sangat berperan penting terhadap jalur pendistribusian barang maupun jasa yang mana ini dilakukan melalui transportasi darat. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak keempat terbanyak didunia dan yang terbanyak di Asia Tenggara telah mengalami peningkatan aktifitas sosial ekonomi seiring dengan kemajuan ekonomi yang telah terjadi. Dengan seiring jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya maka aktifitas masyarakat disuatu wilayah merupakan faktor utama pembangkit kebutuhan perjalanan yang memerlukan adanya tingkat efisiensi, keamanan, serta kenyamanan pengguna jalan dalam melakukan perjalanan. Peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas yang terjadi otomatis menuntut kualitas maupun kuantitas prasarana penunjang yang efisien.

Meningkatnya aktifitas kehidupan sosial masyarakat, maka peranan jalan tentu semakin meningkat pula, oleh karena itu jalan bukan hanya sekedar untuk mempermudah pergerakan atau aktifitas masyarakat, barang dan jasa

melainkan berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya serta lingkungan.

Infrastruktur jalan merupakan suatu peranan penting dalam memudahkan masyarakat dalam beraktifitas setiap hari, pada saat ini setiap Negara selalu ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan membangun infrastruktur jalan sebagai sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya sebagai salah satu unsur pembangunan Nasional. Dan jalan juga sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha pembangunan kehidupan Negara, oleh karena itu jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan fungsinya, maka jalan harus dapat melayani arus lalu lintas untuk mengangkut barang maupun mengangkut manusia dengan demikian tuntutan masyarakat atas hasil pembangunan disamping itu harus mampu menampung volume lalu lintas dan Pekerjaan Umum memiliki beban kendaraan, juga dituntut kerja sama dan keamanan. Untuk itu melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapainya keseimbangan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan Nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Nasional, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum, Nomor : 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Penilikan disebutkan pasal 1 bahwa pemeliharaan jalan, pemeliharaan jalan rutin, pemeliharaan rutin berkala jalan dan rehabilitasi jalan. Pasal 23 menyebutkan tentang penyelenggaraan jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/Kota. Pasal 12 menyebutkan pemrograman pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dengan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merilee S. Grindle (1980) “pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action program* dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”. Mengutip dari buku dasar-dasar kebijakan publik (Leo agustino.2012 : 139).

Seiring berjalannya waktu cepat atau lambat jalan akan mengalami penurunan pelayanan yang ditandai dengan adanya jalan yang rusak atau berlubang, kerusakan yang terjadi juga bervariasi pada setiap segmen di sepanjang ruas jalan apabila jalan tersebut dibiarkan dengan jangka waktu yang lama maka akan memperparah kerusakan jalan itu sendiri dan

mengakibatkan rasa kurang aman dan mengganggu kenyamanan pengendara. Pada dasarnya setiap wilayah akan mengalami penurunan jalan namun akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten/Kota di suatu wilayah. Salah satu tolak ukur yang menjadi keberhasilan suatu program dapat dilihat dari akses lalu lintasnya, karena fasilitas jalan akan mempengaruhi investor agar para investor tertarik untuk berkunjung dan berinvestasi sehingga APBD meningkat.

Sesuai dalam hal pemeliharaan jalan yang rusak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon berperan penting dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan terutama pada daerah yang bisa dikatakan mendukung dalam hal pembangunan daerah, oleh karena itu masih banyaknya pembangunan jalan yang kurang terpelihara di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon dan khususnya pada jalan yang ingin penulis teliti yaitu Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Kabupaten Cirebon yang mana ini merupakan termasuk salah satu ruas jalan Kedawung-Waruasem yang berada di wilayah 4 yang masih terdapatnya kerusakan jalan yang parah di jalan tersebut yang dirasa mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan tersebut. Melihat fenomena tersebut prasarana jalan di wilayah Kabupaten Cirebon masih banyak jalan yang rusak dan kurang terpelihara yang mana ini harus jadi perhatian Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon agar memberikan perhatian dan

pemeliharaan jalan rusak tersebut yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu dalam hal ini yang terjadi di jalan Sultan Ageng Tirtayasa Kabupaten Cirebon masih terdapat permasalahan dalam pemeliharaan jalan yang diantaranya:

- a. Kurangnya Perhatian oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dalam menangani jalan Rusak di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Kabupaten Cirebon.
- b. Implementasi Kebijakan Pemeliharaan jalan dalam menangani jalan yang rusak dirasa kurang optimal mengingat kondisi jalan disebagian wilayah Kabupaten Cirebon masih sering berlubang.

Tujuan pemeliharaan jalan ini untuk meminimalisir kondisi jalan yang rusak dan mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di jalan Sultan Ageng Tirtayasa Kabupaten Cirebon dan dapat memberikan kenyamanan oleh pengguna jalan dalam memelihara jalan di Pantura Kabupaten Cirebon. Akan tetapi tujuan pokok dan fungsi tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul : **“Implementasi Kebijakan Tentang Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Pemeliharaan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Kabupaten Cirebon)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pernyataan masalah yang ingin diteliti yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon yang menurut peneliti masih belum optimal.

1.3. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak pada permasalahan di atas, selanjutnya penulis menyusun identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan Tentang Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon?
4. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Tentang Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan Tentang Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.
4. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

1.5. Kegunaan Penelitian

Terdapat kegunaan yang dapat diambil baik dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara. Khususnya kajian Implementasi Kebijakan Tentang Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Dapat memperkaya literatur atau kepustakaan dalam bidang Administrasi Negara, terutama Implementasi Kebijakan Tentang Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat terutama bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon agar lebih optimal dalam

meningkatkan pemeliharaan jalan Kabupaten Cirebon agar memberikan kenyamanan pengguna jalan Pantura Kabupaten Cirebon.

Bagi penulis, dapat memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini, serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang ingin diteliti dan dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis dalam karya ilmiah ini.

1.6. Kerangka Pemikiran

Merilee S. Grindle (1980 : 93) mencatat bahwa :

“Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Dalam hal ini, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan; jenis keuntungan yang dihasilkan; derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan, dan pengimplementasi kebijakan; serta sumber daya yang dihasilkan. Dalam hal konteks, ada tiga variabel utama yang harus diperhatikan: kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakter institusi, dan tingkat kepatuhan”.

Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :

- Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok,
- Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

1. Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)

- Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang mempengaruhi), *interested affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- Type of Benefits* (Tipe Manfaat), pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang ingin Dicapai), setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- d. *Site of Decision Making* (Letak pengambilan keputusan), pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
 - e. *Program implementor* (Pelaksana Program), dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
 - f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan), pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik..
2. *Content of Policy* menurut Grindle adalah :
- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang ingin digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan pemeliharaan jalan secara lebih mendalam.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pemeliharaan jalan ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model Merilee S. Grindle. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua variabel, yaitu:

1. Isi kebijakan, meliputi:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan.

2. Konteks implementasi, meliputi:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

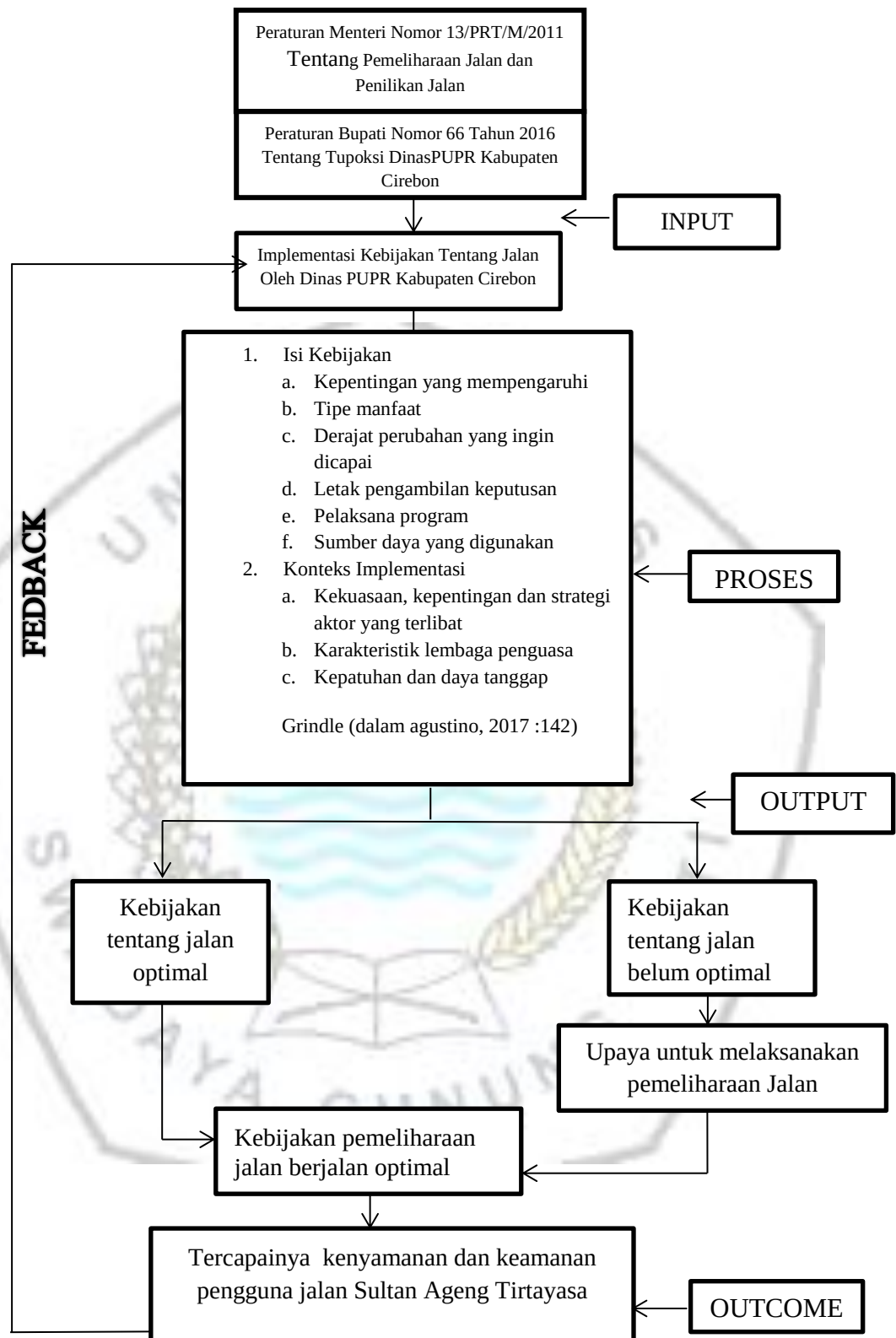
Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan tentang jalan dari kedua dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang jalan dalam hal ini yaitu kerusakan jalan sultan ageng tirtayasa dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon harus mampu menerapkan kedua dimensi tersebut agar proses pelaksanaan

implementasi kebijakan tentang jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjalan maksimal.

Dari implementasi pelaksanaan kebijakan melalui indikator tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan tentang jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon sebagai berikut:





Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7. Definisi dan Operasionalisasi konsep penelitian

1.7.1. Definisi Konsep Penelitian

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, dimana antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Dalam buku (Agustino, 2016:128) menurut Van Meer dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya

yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah/dan/atau air, serta diatas permukaan airkeculai jalan kereta api.

1.7.2. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Tabel 1.1

Operasionalisasi Konsep Penelitian

Aspek kajian	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan (Merilee S. Grindle dalam Agustino Leo, 2016 : 143)	1. Isi Kebijakan (<i>Content Of Policy</i>)	- Kepentingan - kepentingan yang ingin dicapai - Tipe manfaat - Derajat perubahan yang ingin dicapai - Letak pengambilan keputusan - Pelaksana program - Sumber-sumber daya yang digunakan
	2. Konteks Implementasi (<i>Context Of Policy</i>)	- Kekuasaan kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat - Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa - Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Cara ilmiah sendiri didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.

Sadjana dan Ibrahim dalam Satori dan Komariah (2014 : 21) menjelaskan pengertian penelitian sebagai “suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan.

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan menentukan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan “bertahap” karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya. (Semiawan, 2010:3)

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara/metode. Atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*) (Juliansyah noor, 2017:22)

1.8.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian adalah aspek demokratis, maksudnya bahwa masukan dan informasi partisipan menjadi sumber data yang sangat penting. Ide, pendapat dan pikiran mereka diakomodasi. Metode penelitian memperlakukan partisipan benar-benar subjek dan bukan objek. Disinilah partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga, karena informasinya sangat bermanfaat. Metode penelitian ini memberikan ruang yang sangat besar kepada partisipan. Mereka terhindar dari pengobjektifan oleh peneliti yang hanya menjawab pertanyaan yang sudah di siapkan dan memilih jawaban yang sudah tersedia. (Semiawan, 2010:8)

Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan

postpositivistik karena berdasarkan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistic karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo). (Siyoto dan Sodik, 2015:27)

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. (Siyoto dan Sodik, 2015:28)

Penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya.

Dimana dalam penyajian data penulis menggunakan pemaparan dan juga gambaran-gambaran, karena penulis hanya ingin menggambarkan situasi atau peristiwa dan memanfaatkan teknik wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Sugiyono dalam Harbani Pasolong (2013: 161) Mengemukakan bahwa:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi”.

Strauss dan Corbin (dalam helaluddin 2019 : 10) Mengutarakan bahwa:

“Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya”

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian yang digunakan untuk menggali, menemukan, menjelaskan serta memaparkan tentang “ Implementasi Kebijakan Tentang Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Pemeliharaan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa)

1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi, keterangan atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sampel atau informan yang dilibatkan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik pemilihan informan yaitu dengan cara *Purposive Sampling* artinya pengambilan sampel atau informan dipilih sesuai dengan kebutuhan (Sugiyono, 2017: 85).

Dengan kata lain sampel tersebut dipilih karena memang menjadi sumber dan kaya dengan informasi tentang fenomena yang ingin diteliti. Kekuatan dari sampel *purposive* adalah dari sedikit kasus yang diteliti secara mendalam memberikan banyak pemahaman tentang topik.

Untuk penelitian kualitatif pada dasarnya terdapat dua macam informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah orang-orang yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu :

1. Informan Kunci :

- Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR Kabupaten Cirebon

2. Informan Pendukung

- Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan
- Kepala UPTD Wilayah IV
- RT/RW sekitar
- Pengguna Jalan

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data juga adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam penelitian.

Sugiyono (2017 : 225) mengemukakan bahwa :

“Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.”

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi (Sugiyono, 2017 : 226-240).

1) Studi Kepustakaan atau Literatur

Penulis melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, skripsi yang relevan dari penelitian terdahulu, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Studi Lapangan

a) Wawancara

Wawancara atau interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula dimana ada kontak langsung dengan tatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi.

Metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam, langsung, tidak terstruktur, dan individual. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.

b) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti di tempat penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode studi dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda berupa buku, majalah, dokumen, peraturan, dan lain-lain. Dalam perkembangannya dokumen juga tidak hanya berupa tulisan saja namun dapat berupa pula benda peninggalan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah fakta yang masih mentah artinya yang masih perlu diolah atau dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan. (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018: 214)

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif sama maknanya dengan dengan uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian atau alat pengumpul data utama dalam penelitian kualitatif bukan angket seperti pada penelitian kuantitatif melainkan peneliti itu sendiri yang dibantu oleh instrumen

lain seperti buku, catatan lapangan, kamera, alat perekam, dan lain-lain.

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada validitas dan reabilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbebeda” antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya. Terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini reabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2017 : 267).

Sugiyono (2017 : 270), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reability), dan *confirmability* (objektivitas).

Penulis melakukan keabsahan data dengan melakukan teknik Trianggulasi Wiersma (Sugiyono, 2017 : 273), mengatakan bahwa :

“triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufflency of the data according to the convergenceof multiple data sourcer or multiple data collection procedures”

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi pengumpulan data dan waktu”.

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan teknik trianggulasi adalah teknik pengujian dengan kabsahan data dengan cara membandingkan (*check*,

recheck, crosscheck) berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, dari berbagai cara/teknik. Dan dari berbagai waktu.

Pengecekan keabsahan data dengan sumber menurut Moelong (2010: 331) dapat diketahui dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan dengan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dalam ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan dan data mendukung penelitian. Jadi penelitian ini menekankan kepada Implementasi Kebijakan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dalam Pemeliharaan Jalan di Pantura Kabupaten Cirebon Pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013: 210) mengemukakan bahwa

“aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi mudah di mengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.(Ade Ismayani 2009: 76)

Menurut patton (dalam moleong, 2017 :280) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengkoordinasikannya kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Tahap reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera di lakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Tahap penyajian data

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami.

c. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan tidak akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2013: 215)

1.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Sebuah penelitian pasti memiliki lokasi dan jadwal penelitian yang telah dipilih sesuai dengan tujuan, lokasi, jadwal, biaya dan lain sebagainya. Sebagai penjelasan singkat dan padat, peneliti mencoba menguraikan lokasi dan jadwal penelitian secara terurut dibawah ini.

1.9.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jl. Pangeran Cakra Buana No. 100, Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian yaitu:

- a. Letak Dinas PUPR Kabupaten Cirebon lumayan startegis dari rumah peneliti dan mudah dijangkau oleh peneliti sehingga diharapkan dapat mempengaruhi jalannya penelitian.

- b. Belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini.
- c. Karena adanya permasalahan jalan di pantura masih banyak lubang yang sangat membahayakan pengguna jalan, jadi peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang judul penelitian ini.

1.9.2. Jadwal Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis selama 6 bulan dimulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020. Dengan uraian jadwal penelitian sebagai berikut :

